

CILACAP, INFO_PAS – Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan terobosan yang mengubah cara tradisional pemerintahan beroperasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Melalui SPBE, pemerintah dapat menyediakan layanan yang lebih efisien dan cepat kepada masyarakat. Ini adalah langkah inovatif dalam upaya meningkatkan kinerja dan efektivitas aparatur negara di era digital, Sabtu (08/06/2024).

Dengan memanfaatkan teknologi canggih, pemerintah mampu mengoptimalkan proses administrasi, mempercepat penanganan berbagai layanan publik, dan memperluas jangkauan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat. SPBE tidak hanya menjadi simbol kemajuan teknologi dalam tatanan pemerintahan, tetapi juga merupakan strategi penting dalam menciptakan pelayanan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan warga negara.

Tujuan dengan adanya SPBE yaitu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. SPBE juga merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir ataupun mencegah terjadinya pungutan liar. Dengan penerapan SPBE diharapkan dapat meningkatkan proses kerja menjadi lebih efisien dan efektif dan tentunya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah menjadi kenyataan. Salah satu contoh nyata dari implementasi ini adalah melalui penggunaan beberapa aplikasi khusus. Misalnya, Aplikasi Sisumaker telah digunakan untuk mengelola segala urusan persuratan di dalam institusi tersebut. Selain itu, Aplikasi Simpeg (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) menjadi langkah inovatif lainnya. Simpeg menjadi satu-satunya sistem informasi yang terintegrasi dengan baik, mencakup seluruh aspek dari pendataan pegawai, pengolahan data, prosedur kerja, tata kelola sumber daya manusia, hingga teknologi informasi.

Tak hanya itu, Kemenkumham juga telah merancang Sistem Database Pemasyarakatan, sebuah aplikasi khusus yang ditujukan untuk mengelola semua data yang terkait dengan kegiatan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan). Dengan adanya aplikasi-aplikasi tersebut, Kemenkumham memperlihatkan keseriusannya dalam memanfaatkan teknologi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasionalnya, sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen Kemenkumham dalam menghadirkan inovasi dalam penyelenggaraan tugas-tugasnya demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dan terencana.